



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2023

KEMEN-ATR/BPN. Informasi Geospasial Tematik
Pertanahan Ruang. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
PERTANAHAN DAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan informasi geospasial tematik demi terwujudnya tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diperlukan pengelolaan sistem informasi pelayanan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang dalam satu referensi geospasial yang melingkupi standar, basis data, dan sistem informasi;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sistem informasi dalam layanan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna yang didukung oleh informasi geospasial yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan secara umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan, diperlukan pedoman mengenai penyelenggaraan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang;
- c. bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan penanggung jawab informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang dalam kebijakan satu peta, penyelenggara data dalam satu data Indonesia, dan salah satu simpul jaringan dalam jaringan informasi geospasial nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan

- manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
 3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
 4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
 5. Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut IGT Pertanahan dan Ruang adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema pertanahan dan ruang yang dibuat mengacu pada IGD.
 6. Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIG adalah suatu sistem komputerisasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk melakukan akuisisi, verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaruan data, manajemen data, pertukaran data, manipulasi data, serta analisa data mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan (geografis) yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan spasial.
 7. Jaringan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat JIG adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
 8. Basis Data adalah suatu sistem digital yang digunakan sebagai sarana penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format baku untuk memudahkan kegiatan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan IGT Pertanahan dan Ruang.
 9. Unit Produksi Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan produksi IGT Pertanahan dan Ruang dengan DG dan IG yang dibantu oleh unit kerja terkait.
 10. Unit Pengelola Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah unit kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan dan layanan IGT Pertanahan dan Ruang berdasarkan hasil kerja Unit Produksi untuk menjadi suatu IGT multiguna.
 11. Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang yang dikelola oleh Unit Pengelola.
 12. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam

- dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan proyeksi dan skala tertentu.
13. Metadata adalah ringkasan terstruktur dari informasi yang terkait dengan data, untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan pengolahan dan pencarian data.
 14. Berita Acara adalah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kompilasi, integrasi, atau sinkronisasi data IGT Pertanahan dan Ruang.
 15. Pemegang Hak Akses adalah pemangku kepentingan yang diberikan akses untuk memperoleh IGT Pertanahan dan Ruang sesuai dengan klasifikasi kewenangannya.
 16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
 17. Simpul Jaringan IGT Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang.
 18. Rencana Aksi Percepatan adalah dokumen yang memuat target, sasaran, dan strategi percepatan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang.
 19. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
 20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
 21. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
 22. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal pada lingkungan Kementerian di wilayah kabupaten atau kota.

BAB II TEMA IGT PERTANAHAN DAN RUANG

Pasal 2

- (1) Tema IGT Pertanahan dan Ruang terdiri atas:
 - a. pertanahan; dan
 - b. ruang.
- (2) Tema pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tema yang berkaitan paling sedikit dengan kegiatan:
 - a. penetapan hak;
 - b. pendaftaran tanah;

- c. redistribusi tanah;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
 - f. pengadaan tanah;
 - g. pengembangan tanah;
 - h. konsolidasi tanah;
 - i. penilaian tanah;
 - j. pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah; dan
 - k. penanganan atau pencegahan sengketa dan konflik pertanahan.
- (3) Tema ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tema yang berkaitan paling sedikit dengan kegiatan:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Tema IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
UNIT DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang meliputi kegiatan:
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan dan pengamanan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. penggunaan.
- (2) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. produksi IGT;
 - b. pengelolaan IGT; dan
 - c. penyebarluasan IGT.
- (3) Tahapan produksi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan.
- (4) Tahapan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan penyimpanan dan pengamanan.
- (5) Tahapan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan penyebarluasan dan penggunaan.
- (6) Skema alur kerja penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Unit dan Tahapan Produksi Informasi Geospasial Tematik
Pertanahan dan Ruang

Paragraf 1
Unit Produksi Informasi Geospasial Tematik
Pertanahan dan Ruang

Pasal 4

Unit Produksi meliputi:

- a. unit kerja pusat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan;
- b. bidang di Kantor Wilayah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan; dan
- c. seksi di Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis bidang dan kawasan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan produksi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Unit Produksi mendapat dukungan data dan informasi dari:

- a. seluruh direktorat jenderal di lingkungan Kementerian;
- b. Kantor Wilayah; dan
- c. Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Senat

Pasal 6

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:
 - a. melakukan produksi IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dalam bentuk digital dan/atau analog sesuai kewenangannya melalui survei lapangan dan/atau pengumpulan data sekunder dari lintas sektor serta bahan lainnya;
 - b. melakukan pengolahan IGT Pertanahan dan Ruang yang dibuat mengacu pada IGD dan sesuai dengan standar yang berlaku;
 - c. menyajikan hasil pengolahan IGT Pertanahan dan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kendali mutu untuk pelaksanaan kontrol kualitas terhadap proses dan hasil setiap kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. melakukan pemutakhiran IGT Pertanahan dan

- Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan dan menjamin IGT Pertanahan dan Ruang yang terverifikasi dan tervalidasi; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan produksi IGT Pertanahan dan Ruang secara berkala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Produksi berwenang:
- a. menyediakan pelaksana kegiatan yang berasal dari aparatur sipil negara, surveyor berlisensi, tenaga ahli, dan tenaga pelaksana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data IGT Pertanahan dan Ruang pendukung pelaksanaan kegiatan berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. menyusun rencana pembiayaan sesuai dengan sumber pembiayaan yang tersedia; dan
 - d. mengatur bentuk kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyediaan data dan informasi.

Paragraf 2

Tahapan Produksi Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Pasal 7

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan produksi IGT Pertanahan dan Ruang melalui:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. pengumpulan DG dan IG;
 - c. pengolahan DG dan IG;
 - d. analisis DG dan IG; dan
 - e. penyerahan DG dan IG.
- (2) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk mempersiapkan hal yang bersifat teknis dan nonteknis untuk mendukung proses pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang.
- (3) Pengumpulan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG dan IGT Pertanahan dan Ruang yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang.
- (4) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG menjadi IGT Pertanahan dan Ruang sesuai standar kendali mutu IGT Pertanahan dan Ruang.
- (5) Analisis DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses atau cara pencarian intisari informasi, kecenderungan, dan pola-pola tertentu dalam satu IGT Pertanahan dan Ruang atau lebih.
- (6) Penyerahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan proses atau cara menyerahkan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Unit Pengelola.

- (7) Produksi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - b. memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) Hasil IGT Pertanahan dan Ruang yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan pemutakhiran:
- (2) Pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimuat dalam Rencana Aksi Percepatan.
- (3) Pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang yang dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal terjadi peristiwa atau kondisi tertentu yang berakibat berubahnya IGT Pertanahan dan Ruang.
- (4) Tata cara pemutakhiran IGT Pertanahan dan Ruang dilakukan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian Ketiga

Unit dan Tahapan Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Paragraf 1

Unit Pengelola Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Pasal 9

Unit Pengelola merupakan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan IGT Pertanahan dan Ruang.

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola memiliki tugas:
 - a. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. melakukan sosialisasi dan pembinaan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - c. menyediakan sistem informasi pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - d. melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - e. menyusun Rencana Aksi Percepatan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
 - f. menetapkan kriteria dan standar struktur IGT Pertanahan dan Ruang;
 - g. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang bersama dengan Unit Penyebarluasan;
 - h. melakukan analisis tematik derivatif yang dibuat

- mengacu pada IGD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengelola IGT Pertanahan dan Ruang yang terstandar dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi;
 - j. melakukan supervisi terhadap kegiatan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
 - l. melakukan pengelolaan untuk kegiatan layanan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, sinkronisasi, dan pemutakhiran Basis Data;
 - n. mendorong capaian target kinerja Unit Produksi;
 - o. melaksanakan layanan IGT Pertanahan dan Ruang multiguna; dan
 - p. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan layanan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola berwenang:
- a. menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan pencapaian target yang berkaitan dengan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
 - b. menetapkan standar pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
 - c. menetapkan standar layanan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian;
 - d. membuat dan menyajikan katalog IGT Pertanahan dan Ruang bersama Unit Penyebarluasan;
 - e. membuat Peta telaah IGT Pertanahan dan Ruang;
 - f. melakukan analisis terhadap IGT Pertanahan dan Ruang dari Unit Produksi untuk menghasilkan IGT Pertanahan dan Ruang derivatif multiguna; dan
 - g. melakukan kerja sama pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang dengan kementerian/lembaga dan/atau swasta.
- (3) Unit Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kantor Wilayah.

Paragraf 2

Tahapan Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Pasal 11

- (1) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang melalui tahapan:
- a. penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. pemantauan dan evaluasi layanan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang;

- c. analisis IGT Pertanahan dan Ruang derivatif; dan
 - d. penyerahan IGT Pertanahan dan Ruang ke Unit Penyebarluasan.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan cara menempatkan DG dan IGT Pertanahan dan Ruang pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IGT Pertanahan dan Ruang.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi layanan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan peninjauan kinerja layanan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang yang dilakukan secara berkala.
 - (4) Analisis IGT Pertanahan dan Ruang derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan analisis tambahan untuk menghasilkan informasi baru dari IGT Pertanahan dan Ruang.
 - (5) Penyerahan IGT Pertanahan dan Ruang ke Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses atau cara menyerahkan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Unit Penyebarluasan.

Bagian Keempat
Unit dan Tahapan Penyebarluasan Informasi Geospasial
Tematik Pertanahan dan Ruang

Paragraf 1
Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik
Pertanahan dan Ruang

Pasal 12

Unit Penyebarluasan merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan dan inovasi sistem informasi, serta pengelolaan data dan penyajian informasi.

Pasal 13

- (1) Unit Penyebarluasan memiliki tugas:
 - a. menyediakan sistem IGT Pertanahan dan Ruang yang berfungsi sebagai JIG;
 - b. membangun, mengembangkan, dan memelihara keberlangsungan sistem akses IGT Pertanahan dan Ruang;
 - c. melakukan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang yang telah dikelola oleh Unit Pengelola untuk dapat dimanfaatkan dan dibagipakaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIGN yang memenuhi kaidah interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyimpan hasil IGT Pertanahan dan Ruang dalam suatu sistem informasi elektronik yang aman; dan

- f. menyusun laporan dan publikasi pelaksanaan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyebarluasan berwenang:
- a. membuat klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi pakai IGT Pertanahan dan Ruang di instansi pemerintah dan nonpemerintah;
 - b. melakukan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang kepada instansi pemerintah dan nonpemerintah; dan
 - c. melakukan berbagi pakai data melalui JIG.

Paragraf 2

Tahapan Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Pasal 14

Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang dengan tata kelola meliputi:

- a. pembangunan JIG sebagai sistem penyebarluasan;
- b. pemberian layanan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang;
- c. pemeliharaan keberlangsungan JIG sebagai sistem penyebarluasan; dan
- d. pengelolaan kewenangan akses berbagi pakai data.

Paragraf 3

Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang diselenggarakan oleh Unit Penyebarluasan melalui kegiatan pemberian akses dan pendistribusian IGT Pertanahan dan Ruang kepada Pemegang Hak Akses yang diperoleh dari kegiatan Unit Pengelola IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG.
- (2) Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi kewenangan akses.
- (3) Klasifikasi kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemegang Hak Akses untuk berbagi IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG yang berlaku bagi:
 - a. pemerintah, yaitu Menteri, menteri atau pimpinan lembaga, kepala daerah, unit kerja eselon I, dan Unit Produksi; dan
 - b. nonpemerintah, yaitu swasta, akademisi, pejabat profesi, asosiasi, dan masyarakat umum.
- (4) Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengunduh penuh;
 - b. mengunduh terbatas;

- c. melihat; dan/atau
 - d. tertutup.
- (5) Mengunduh penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kewenangan Pemegang Hak Akses untuk mengunduh IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG secara penuh.
 - (6) Mengunduh terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kewenangan Pemegang Hak Akses untuk mengunduh IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG secara terbatas dari segi wilayah kewenangan, urgensi, format, dan/atau versi data.
 - (7) Melihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kewenangan Pemegang Hak Akses untuk melihat IGT Pertanahan dan Ruang secara langsung melalui JIG.
 - (8) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, yaitu Pemegang Hak Akses tidak memiliki kewenangan melihat dan mengunduh IGT Pertanahan dan Ruang.
 - (9) Klasifikasi kewenangan akses penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang Tanpa melalui JIG

Pasal 16

- (1) Dalam hal JIG tidak beroperasi, penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang dilakukan tanpa melalui JIG.
- (2) Dalam hal JIG tidak beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Hak Akses dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh IGT Pertanahan dan Ruang kepada Unit Penyebarluasan.
- (3) Format surat permohonan IGT Pertanahan dan Ruang tanpa melalui JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Pemegang Hak Akses IGT Pertanahan dan Ruang

Pasal 17

- (1) Pemegang Hak Akses dapat diberikan akses IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sesuai dengan klasifikasi kewenangan akses IGT Pertanahan dan Ruang.
- (2) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara langsung mengakses IGT Pertanahan dan Ruang.
- (3) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang Hak Akses dan penerima mandat akses

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab terhadap validitas, keamanan, dan kerahasiaan serta tidak menyalahgunakan IGT Pertanahan dan Ruang.
- (5) Selain Pemegang Hak Akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk melakukan akses atas IGT Pertanahan dan Ruang melalui JIG.
 - (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STANDARDISASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang harus dilakukan sesuai dengan standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan masing-masing oleh:
 - a. Unit Produksi;
 - b. Unit Pengelola; atau
 - c. Unit Penyebarluasan.
- (3) Penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada standar:
 - a. di lingkungan Kementerian;
 - b. di kementerian/lembaga pemerintah lainnya; dan/atau
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua Standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang oleh Unit Produksi

Pasal 19

- (1) Standar IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dan ditetapkan oleh Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. pengumpulan DG dan IG;
 - c. pengolahan DG dan IG;
 - d. analisis DG dan IG; dan
 - e. penyerahan DG dan IG.
- (2) Prosedur penyelenggaraan standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang oleh Unit Produksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang oleh Unit Pengelola

Pasal 20

- (1) Standar IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dan ditetapkan oleh Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. penyimpanan dan pengamanan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. pemantauan dan evaluasi layanan pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - c. analisis tematik derivatif; dan
 - d. penyerahan IGT Pertanahan dan Ruang ke Unit Penyebarluasan.
- (2) Prosedur penyelenggaraan standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang oleh Unit Pengelola tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang
oleh Unit Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Standar IGT Pertanahan dan Ruang yang disusun dan ditetapkan oleh Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pembangunan JIG sebagai sistem penyebarluasan;
 - b. pemberian layanan penyebarluasan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - c. pemeliharaan keberlangsungan JIG sebagai sistem penyebarluasan; dan
 - d. pengelolaan kewenangan akses berbagi pakai data.
- (2) Prosedur penyelenggaraan standardisasi IGT Pertanahan dan Ruang oleh Unit Penyebarluasan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KOMPILOSI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI IGT
PERTANAHAN DAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi merupakan bentuk pemantauan dan evaluasi pada proses pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang.

- (2) Mekanisme kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang

Pasal 23

- (1) Kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang merupakan kegiatan pengumpulan data IGT Pertanahan dan Ruang yang dimiliki oleh Unit Produksi di lingkungan Kementerian.
- (2) Kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan Ruang; dan
 - c. penerbitan dokumen hasil kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang berupa Berita Acara kompilasi.
- (3) Kegiatan kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola dibantu oleh tim pemeriksa secara elektronik dan nonelektronik.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan.

Pasal 24

- (1) Pengumpulan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:
 - a. metadata dari IGT yang sesuai dengan standar nasional yang berlaku;
 - b. penentuan ketelitian data, yang dapat menggunakan skala angka atau batas administrasi wilayah;
 - c. kode referensi;
 - d. dokumen standar berupa norma, standar, prosedur dan kriteria terkait produksi IGT Pertanahan dan Ruang;
 - e. dokumen penetapan untuk IGT Pertanahan dan Ruang yang wajib ditetapkan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya.
- (2) IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berbentuk format *shapefile* atau Basis Data spasial;
 - b. mencantumkan sistem koordinat geografis;
 - c. mencantumkan skala; dan
 - d. merupakan IGT Pertanahan dan Ruang yang paling mutakhir.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b

merupakan kegiatan memeriksa IGT Pertanahan dan Ruang yang telah dikumpulkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (2) Pemeriksaan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemeriksa.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyatakan:
 - a. IGT Pertanahan dan Ruang sesuai; atau
 - b. IGT Pertanahan dan Ruang tidak sesuai.
- (2) Hasil pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang untuk IGT Pertanahan dan Ruang yang sudah dinyatakan sesuai; dan
 - b. dokumen tertulis untuk IGT Pertanahan dan Ruang yang dinyatakan tidak sesuai.
- (3) Penyusunan Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas Unit Produksi yang menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. jenis IGT Pertanahan dan Ruang;
 - c. jenis dokumen yang diserahkan;
 - d. cakupan wilayah IGT Pertanahan dan Ruang;
 - e. catatan atas IGT Pertanahan dan Ruang yang disampaikan; dan
 - f. tanda tangan pejabat yang berwenang dalam Unit Produksi yang menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang dan ketua tim pemeriksa.
- (4) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas Unit Produksi yang menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. keterangan yang menjelaskan alasan IGT Pertanahan dan Ruang dinyatakan tidak sesuai; dan
 - c. tanda tangan ketua tim pemeriksa atau yang mewakili secara sah.
- (5) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh tim pemeriksa kepada Unit Produksi untuk diperbaiki sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Unit Produksi menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Unit Pengelola untuk dilaksanakan pemeriksaan kesesuaian IGT Pertanahan dan Ruang.
- (7) Ketua tim pemeriksa menyampaikan Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Unit Produksi; dan
 - b. unit teknis yang terlibat dalam produksi IGT.

- (8) Format Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Integrasi IGT Pertanahan dan Ruang

Pasal 27

- (1) Integrasi IGT Pertanahan dan Ruang dilaksanakan setelah IGT Pertanahan dan Ruang dinyatakan sesuai berdasarkan Berita Acara kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.
- (2) Kegiatan integrasi IGT meliputi:
 - a. verifikasi IGT; dan
 - b. penerbitan dokumen Berita Acara integrasi IGT Pertanahan dan Ruang.

Pasal 28

- (1) Verifikasi IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan verifikasi terhadap dokumen pendukung IGT Pertanahan dan Ruang yang disampaikan berdasarkan tipologi dan karakteristik IGT Pertanahan dan Ruang.
- (2) Verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sistem koordinat;
 - b. kesesuaian dengan unsur IGD;
 - c. aspek legal;
 - d. konsistensi atribut;
 - e. konsistensi topologi;
 - f. kelengkapan metadata; dan
 - g. cakupan wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi data, Unit Pengelola membentuk tim verifikator.

Pasal 29

- (1) Hasil verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyatakan:
 - a. IGT Pertanahan dan Ruang sudah terintegrasi; atau
 - b. IGT Pertanahan dan Ruang belum terintegrasi.
- (2) Dalam hal verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang menyatakan IGT Pertanahan dan Ruang belum terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tim verifikator menerbitkan dokumen tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Unit Produksi yang menyelenggarakan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. keterangan yang menjelaskan alasan IGT Pertanahan dan Ruang dinyatakan belum terintegrasi; dan
 - c. tanda tangan ketua tim verifikator atau yang mewakili secara sah.

- (3) Unit Produksi yang menyelenggarakan IGT Pertanahan dan Ruang harus memperbaiki IGT Pertanahan dan Ruang sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Hasil perbaikan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Unit Pengelola untuk dilaksanakan verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang.
- (5) Format dokumen tertulis integrasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil verifikasi IGT Pertanahan dan Ruang menyatakan IGT Pertanahan dan Ruang sudah terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, Unit Pengelola menerbitkan Berita Acara integrasi IGT Pertanahan dan Ruang yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Unit Produksi yang menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang;
 - b. nama IGT Pertanahan dan Ruang;
 - c. hasil verifikasi data IGT Pertanahan dan Ruang;
 - d. pernyataan IGT Pertanahan dan Ruang sudah terintegrasi;
 - e. tanda tangan perwakilan Unit Produksi yang menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang; dan
 - f. tanda tangan Unit Pengelola atau yang mewakili secara sah.
- (2) Berita Acara integrasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Unit Pengelola kepada Unit Produksi yang menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang.
- (3) Format Berita Acara integrasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang

Pasal 31

- (1) Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan IGT Pertanahan dan Ruang.
- (2) Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola bersama Unit Produksi.
- (3) Sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. klarifikasi; dan
 - c. validasi.

Pasal 32

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a merupakan prosedur yang dilakukan dengan metode tumpang susun (*overlay*) antar IGT Pertanahan dan Ruang menggunakan perangkat lunak SIG oleh Unit Pengelola.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penentuan IGT Pertanahan dan Ruang hasil integrasi yang akan ditumpang susun (*overlay*);
 - b. identifikasi penggunaan atribut IGT Pertanahan dan Ruang;
 - c. analisis tumpang susun (*overlay*) IGT Pertanahan dan Ruang;
 - d. identifikasi hasil tumpang susun (*overlay*); dan
 - e. penyusunan Berita Acara sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang..

Pasal 33

- (1) Penentuan IGT Pertanahan dan Ruang hasil integrasi yang akan ditumpang susun (*overlay*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola untuk menentukan IGT Pertanahan dan Ruang yang akan ditumpang susun (*overlay*) pada kegiatan sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang.
- (2) Identifikasi penggunaan atribut IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan identifikasi terhadap penggunaan atribut pada IGT Pertanahan dan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis tumpang susun (*overlay*) IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan melakukan tumpang susun (*overlay*) IGT Pertanahan dan Ruang yang sudah melewati tahap identifikasi penggunaan atribut untuk menghasilkan skema tertentu menggunakan perangkat lunak SIG.
- (4) Identifikasi hasil tumpang susun (*overlay*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d merupakan proses identifikasi hasil analisis tumpang susun (*overlay*) IGT Pertanahan dan Ruang dengan menggunakan perangkat lunak SIG.
- (5) Penyusunan Berita Acara sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e merupakan laporan identifikasi hasil tumpang susun (*overlay*) setelah dilakukan sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang yang diinput oleh Unit Pengelola untuk menghasilkan identifikasi tumpang tindih.
- (6) Format Berita Acara sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana *dimaksud* dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Unit Pengelola dengan membuktikan kesesuaian antara kondisi fisik di lapangan dengan peta dasar acuan pada hasil identifikasi tumpang tindih IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Unit Pengelola kepada Unit Produksi untuk divalidasi.

Pasal 35

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c dilakukan dengan tahapan:

- a. validasi hasil klarifikasi oleh Unit Produksi;
- b. penyampaian hasil validasi oleh Unit Produksi kepada Unit Pengelola paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) diterima oleh Unit Produksi;
- c. dalam hal validasi tidak dapat dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) hari, Unit Produksi mengajukan usulan rencana perbaikan data kepada Unit Pengelola; dan
- d. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c Unit Produksi tidak memberikan tanggapan terkait validasi hasil klarifikasi dan/atau tidak mengajukan usulan rencana perbaikan data, Unit Pengelola menyusun rencana perbaikan data.

Pasal 36

Unit Pengelola menyampaikan hasil sinkronisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi survei dan pemetaan.

BAB VI

JARINGAN INFORMASI PENYELENGGARAAN IGT
PERTANAHAN DAN RUANG

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang menggunakan JIG yang dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh Unit Penyebarluasan.
- (2) Unit Produksi atau Unit Pengelola dapat mengembangkan JIG setelah berkoordinasi dengan Unit Penyebarluasan.
- (3) Pengembangan JIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa aplikasi berbasis perangkat lunak desktop, aplikasi berbasis web, dan/atau aplikasi berbasis mobile.
- (4) Data yang terdapat dalam JIG di lingkungan Kementerian saling terintegrasi antara Unit Produksi, Unit Pengelola, dan Unit Penyebarluasan.
- (5) JIG di lingkungan Kementerian terintegrasi dengan JIGN yang dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

- (6) Integrasi JIG dengan JIGN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 38

- (1) IGT Pertanahan dan Ruang yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dengan persyaratan:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format berbagi pakai yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prosedur:
 - a. data dari Unit Produksi diinput pada JIG Unit Pengelola berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. data dari Unit Pengelola yang sudah disesuaikan dengan kaidah Interoperabilitas Data diinput pada JIG.
- (3) Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Skema pelaksanaan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII LAYANAN IGT PERTANAHAN DAN RUANG

Pasal 39

- (1) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengelolaan IGT Pertanahan dan Ruang menggunakan media elektronik dan nonelektronik.
- (2) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. kesederhanaan;
 - b. kejelasan;
 - c. kepastian waktu;
 - d. akurasi;
 - e. keamanan;
 - f. tanggung jawab;
 - g. kemutakhiran; dan
 - h. kemudahan akses.
- (3) Kesederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang dilakukan dengan metode atau tata cara yang mudah dimengerti.

- (4) Kejelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan prinsip yang menjelaskan dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan dan Ruang tidak boleh memiliki makna ganda atau multitafsir.
- (5) Kepastian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemberian layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang harus diselenggarakan tepat waktu.
- (6) Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan prinsip yang menunjukkan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang akan dilaksanakan secara presisi atau mendekati nilai sesungguhnya.
- (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang harus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap kerahasiaan dalam penggunaan dan penyebarluasannya.
- (8) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit dan Pemegang Hak Akses.
- (9) Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan pembaruan penyelenggaraan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- (10) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan pelaksanaan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang diselenggarakan dengan sistem mudah dijangkau atau diakses.

Pasal 40

- (1) Layanan IGT Pertanahan dan Ruang terdiri atas:
 - a. publikasi;
 - b. interaksi; dan
 - c. kolaborasi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu kegiatan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang sifatnya bebas diakses oleh publik melalui media sosial, layanan berbasis web, dan/atau media komunikasi lainnya.
- (3) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kegiatan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang sifatnya berdasarkan permintaan dari pengguna melalui media sosial, layanan berbasis *web*, dan/atau media komunikasi lainnya serta tidak dikenakan biaya.
- (4) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu kegiatan layanan IGT Pertanahan dan Ruang yang sifatnya mendukung kerja sama antar pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.
- (5) Kegiatan layanan IGT Pertanahan dan Ruang dilakukan oleh Unit Penyebarluasan berkoordinasi dengan Unit Pengelola.

BAB IX SIMPUL JARINGAN

Pasal 41

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan simpul jaringan dalam JIGN.

BAB X PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan penyelenggaraan IGT Pertanahan dan Ruang di lingkungan Kementerian bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IGT Pertanahan dan Ruang yang sedang dalam proses produksi diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; dan
- b. IGT Pertanahan dan Ruang yang sedang dalam proses pengelolaan dan penyebarluasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHHANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
 GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

TEMA IGT PERTANAHAN DAN RUANG

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ruang	Peta RTRWN	RTRWN	Vektor	.shp/ .gdb	1:1.000.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Nasional (Indonesia)	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Tata Ruang; • Pemanfaatan Ruang; • Pengendalian Pemanfaatan Ruang 	Menggambarakan rencana pola dan struktur Wilayah Nasional
2		Peta RTRW Provinsi	RTRW Provinsi	Vektor	.shp/ .gdb	1:250.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Provinsi	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/		Menggambarakan rencana pola dan struktur Wilayah Provinsi
3		Peta RTRW Kabupaten	RTRW Kabupaten	Vektor	.shp/ .gdb	1:50.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Kabupaten	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/		Menggambarakan rencana pola dan struktur Wilayah Kabupaten
4		Peta RTRW Kota	RTRW Kota	Vektor	.shp/ .gdb	1:25.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Kota	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/		Menggambarakan rencana pola dan struktur Wilayah Kota
5		Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	Vektor	.shp/ .gdb	1:5.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Sebagian/ Seluruh Kecamatan/ Desa	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/		Menggambarakan rencana pola dan struktur detail ruang di Kawasan Perbatasan Negara

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		Peta RTR Pulau/Kepulauan	RTR Pulau/Kepulauan	Vektor	.shp/ .gdb	1:500.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Pulau/ Kepulauan	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/		Menggambarakan rencana pola dan struktur Pulau/ Kepulauan
7		Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	Vektor	.shp/ .gdb	1:25.000 - 1:50.000 (ekisting) ke depan 1:50.000 sesuai sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan terbaru	Titik, Garis, Area	Kawasan	Kawasan Strategis Nasional	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/		Menggambarakan rencana pola dan struktur ruang kawasan strategis nasional
8		Peta RDTR Kabupaten/Kota	RDTR Kabupaten/ Kota	Vektor	.shp/ .gdb	1:5.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Wilayah Perencanaan	https://gistarua.trbnpn.go.id/rtronline/		Menggambarakan rencana pola dan struktur detail ruang di suatu wilayah perencanaan
9	Pertanahan	Peta Tematik Bidang	Bidang Tanah	Vektor	Cad dan Shp	Menyesuaikan hasan	Titik, Garis, Area	Bidang	Berdasarkan AOI Permohonan	KKP	Pendaftaran Tanah	Menggambarakan batas bidang tanah sesuai penetapan batas di lapangan dilengkapi dengan Pasal 35A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			Potensi Subjek Konsolidasi Tanah	Vektor	Cad dan Shp	Menyesuaikan AOI	Titik, Garis, Area	Bidang	Lokasi	SIDAKTPP	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi Tanah; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah 	Menggambarkan bidang tanah yang dapat ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
11			Konsolidasi Tanah	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Titik, garis, polygon	Bidang	Kecamatan/ Lokasi	SIDAKTPP	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi Tanah; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah 	Menggambarkan Bidang Tanah yang akan dilakukan Desain Konsolidasi Tanah
12			Nilai Bidang Tanah	Vektor	shp/gtb	1 : 1.000	Polygon, Point	Bidang	Kab/Kota	Statistik ATR/BPN, GeoKKP, Portal Penilaian Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Tanah; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah 	Menggambarkan Nilai Pasar Bidang Tanah
13			Hak Atas Tanah	Vektor	.shp/gtb	Menyesuaikan huanan	Area	Bidang	Nasional	GeoKKP	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Hak; Pendaftaran Tanah 	Menggambarkan status kepemilikan tanah atau hak penggunaan tanah
14			Penggunaan Tanah	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Bidang/ Kawasan	Nasional	SIGTORA, KKP, Geoportal Tematik	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Hak; Pendaftaran Hak; Redistribusi Tanah; Pemberdayaan Masyarakat; Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah; Konsolidasi Tanah; Penilaian Tanah; 	Menggambarkan Kondisi Penggunaan Tanah
15			Pemilikan Tanah	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Bidang	Nasional	SIGTORA, KKP, Geoportal Tematik	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Hak; Pendaftaran Hak; Redistribusi Tanah; Pemberdayaan Masyarakat; Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah; Konsolidasi Tanah; Penilaian Tanah; 	Menggambarkan Kondisi Pemilikan Tanah
16			Penggunaan Tanah	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Bidang/ Kawasan	Nasional	SIGTORA, KKP, Geoportal Tematik	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Hak; Pendaftaran Hak; Redistribusi Tanah; Pemberdayaan Masyarakat; Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah; Konsolidasi Tanah; Penilaian Tanah; 	Menggambarkan Kondisi Penggunaan Tanah
17			Pemanfaatan Tanah	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Bidang	Nasional	SIGTORA, KKP, Geoportal Tematik	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Hak; Pendaftaran Hak; Redistribusi Tanah; Pemberdayaan Masyarakat; Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah; Konsolidasi Tanah; Penilaian Tanah; 	Menggambarkan Kondisi Pemanfaatan Tanah

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan Penertiban atas Penggunaan atau Pemilikan Tanah; Penanganan atau Pencegahan Sengketa serta Konflik Pertanahan; Tematik Pertanahan Lainnya 	
18			Tanah Terindikasi Telantar	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Titik, Garis, Polygon	Bidang	Lokasi	SI TANTE	Pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah	Menggambarkan bidang tanah yang terindikasi telantar dan bidang tanah telantar
19			Sebaran Lokasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Vektor	.shp	Menyesuaikan AOI	Titik	Bidang	Nasional	Aplikasi PTM	Pemberdayaan masyarakat	Menggambarkan sebaran lokasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat
20			Pertimbangan Teknis Pertanahan	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Bidang	Kab/Kota	-	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Menggambarkan Kesesuaian fungsi pemanfaatan tanah dalam rangka pemberian izin

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21			Inventarisasi Tanah Kritis	Vektor	shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Bidang	Provinsi		Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Menggambarkan kondisi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pada tanah kritis
22			Desain Konsolidasi Tanah	Vektor	shp dan cad	Menyesuaikan AOI	Titik, Garis, Area	Bidang	Lokasi	SIDAKTPP, KKP	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Tanah; • Pengadaan Tanah; • Pengembangan Tanah. 	Menggambarkan Bidang Tanah yang akan dilakukan Desain Konsolidasi Tanah
23			Hasil Penerapan Desain Konsolidasi Tanah	Vektor	shp dan cad	Menyesuaikan AOI	Titik, Garis, Area	Bidang	Lokasi	SIDAKTPP	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Tanah; • Konsolidasi Tanah; • Pengembangan Pertanian. 	Menggambarkan Bidang Tanah yang akan dilakukan Desain Konsolidasi Tanah
24			Informasi mengenai sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Vektor	shp	1:5.000	Area	Bidang	Nasional	Justisia, SKP Mobile, KKP	Penanganan atau pencegahan sengketa serta konflik pertanahan	Pencatatan informasi penanganan kasus pertanahan, monitoring, penyelesaian kasus yang terukur tuntas dan tegas

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25		Peta Dasar Pertanahan	Unsur Dasar Pertanahan	Vektor & Raster	Shp, Cad, gtb, Tiff	1:1.000; 1:2.500; dan 1:10.000	Titik, Garis, Area	Kawasan	Berdasarkan AOI di dalam APL	Bhumi, KKP2, Infradasar	Tematik pertanahan lainnya	Memuat informasi geospasial tematik yang digunakan sebagai dasar dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, tata ruang, dan penyediaan peta-peta tematik pertanahan lainnya, yang berupa peta foto/citra dan/atau peta garis dari hasil pemetaan metode terestris maupun fotogrametris menggunakan foto udara dengan pesawat udara berawak atau pesawat udara nir awak, dan citra satelit, dengan dilengkapi informasi dasar pertanahan hasil kegiatan survei informasi dasar
26			Batas Kawasan Hutan	Vektor	Shp, gtb	1:5.000	Garis dan Area	Kawasan	Berdasarkan AOI pada batas penetapan kawasan hutan-APL	Infradasar, Bhumi		Menggambarkan batas kawasan hutan yang sudah Penetapan dengan APL
27		Peta Tematik Kawasan	Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria	Vektor	shp/gtb	Menyesuaikan AOI	Area	Kawasan	Nasional	SIGTORA	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribusi tanah; • Pemberdayaan tanah masyarakat; • Pengadaan tanah 	Menggambarkan sebaran lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28			Analisa Tanah Objek Reforma Agraria	Vektor	.shp/gdb	Menyesuaikan AOI	Area	Kawasan	Nasional	SIGTORA	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribusi tanah; • Pemberdayaan tanah masyarakat; • Pengadaan tanah; • Pengembangan tanah 	Menggambaran Hasil Analisa Kelayakan, Potensi Objek Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah dan Legalisasi Aset dari Tanah Objek Reforma Agraria
29			Potensi Objek Redistribusi Tanah	Vektor	.shp/gdb	Menyesuaikan AOI	Area	Kawasan	Nasional	SIGTORA	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribusi tanah; • Pemberdayaan tanah masyarakat; • Pengadaan tanah; • Pengembangan tanah 	Menggambaran Hasil Analisa Potensi Objek Redistribusi Tanah yang siap ditindaklanjuti Pemberian Hak melalui Kegiatan Redistribusi Tanah
30			Lahan Baku Sawah Nasional	Vektor	.shp/gdb	1:50.000	Polygon	Kawasan	Nasional	Sistem informasi LP2B Pusdatin	<ul style="list-style-type: none"> • Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang; • Pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah 	Menggambaran sebaran lahan sawah
31			Lahan Sawah Dilindungi	Vektor	.shp	1:5000 s.d 1:10.000	Polygon	Kawasan	Kabupaten/ Kota		<ul style="list-style-type: none"> • Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang; • Pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah 	Menggambaran Kawasan Lahan Sawah Dilindungi

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32			Kemampuan Tanah	Vektor	.shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Kawasan	Nasional		Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Menggambaran hambatan fisik pada satuan lahan/kawasan
33			Data Potensi WP3WT	Vektor	.shp	1:25.000	Area	Kawasan	Nasional		Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Menggambaran potensi akses dan aset di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu
34			Sebaran Potensi Pengembangan Pertanian	Vektor	.shp	Menyesuaikan AOI	Titik, garis, polyline, polygon	Kawasan	Kab/Kota		Pengembangan Pertanian	Menggambaran kawasan yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan pertanian dan pemanfaatan tanah
35			Kawasan Terindikasi Telantar	Vektor	.shp	Menyesuaikan AOI	Titik, Garis, Polygon	Kawasan	Lokasi		Pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah	Menggambaran Kawasan terindikasi telantar dan kawasan telantar
36		Peta Neraca Penatagunaan Tanah	Neraca Penatagunaan Tanah	Vektor	.shp	Menyesuaikan AOI	Polygon	Kawasan	Nasional		Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Menggambaran neraca (komposisi) penggunaan dan ketersediaan tanah
37		Peta Zona Nilai Tanah	Zona Nilai Tanah	Vektor	.shp/gdb	Terdapat 3 Skala : 1:25.000/ 1:10.000/ 1:2.500 (merupakan skala ketelitian)	Polygon, Point	Kawasan	Kab/Kota	Statistik ATR/BPN, GeoKKP, SIPENTA	Penilaian Tanah	Menggambaran Nilai Pasar Tanah di Kawasan Tersebut

No	Tema	Jenis IGT	Informasi	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Satuan Bidang	Cakupan Wilayah	Sistem Informasi	Kegiatan	Deskripsi IGT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38		Infografis Pulau-Pulau Kecil	Persebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia	Vektor	shp	Menyesuaikan ADI	Polygon	Kawasan	Nasional	Bhumi	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Menggambarkan sebaran pulau-pulau kecil

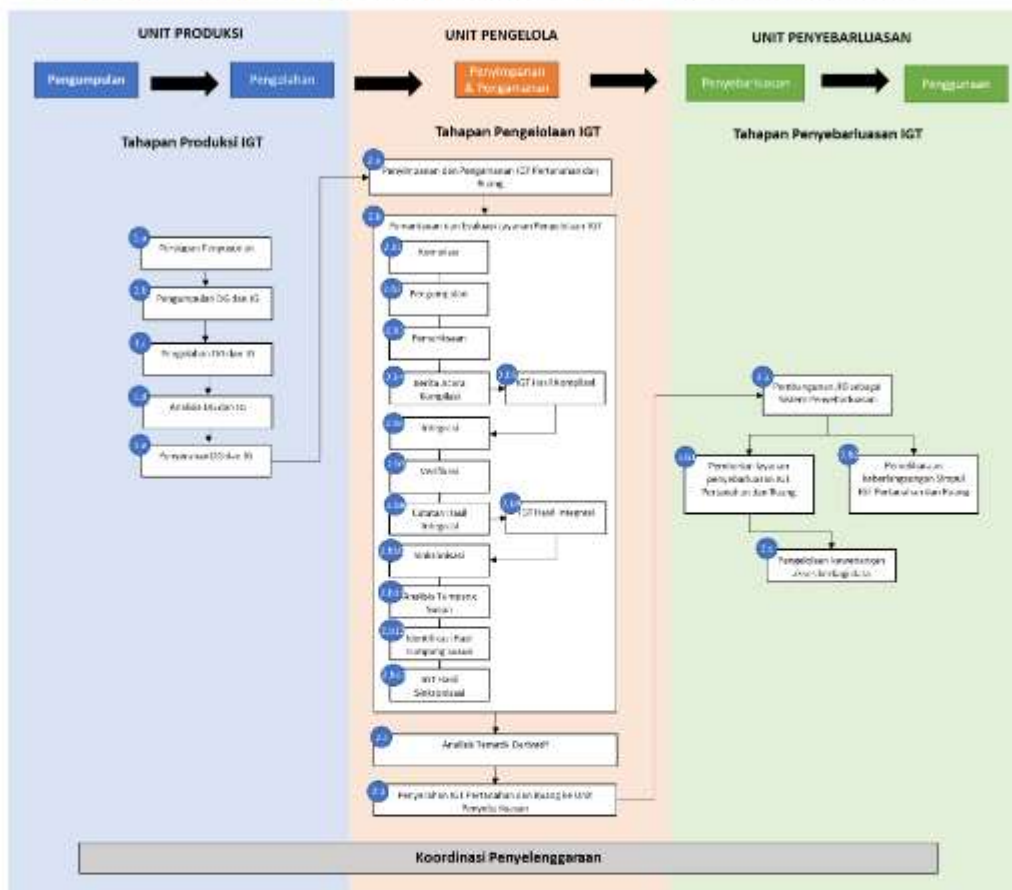
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
 GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

SKEMA ALUR KERJA PENYELENGGARAAN IGT PERTANAHAN DAN RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
 HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
 GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

KLASIFIKASI KEWENANGAN AKSES PENYEBARLUASAN IGT PERTANAHAN DAN RUANG

A. Data dan Informasi Geospasial Tematik Tema Ruang

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A-1	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rencana Struktur Ruang; Sistem Pusat Permukiman	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang; Sistem Jaringan Transportasi Nasional		menjadi tempat objek berada							
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Jaringan Telekomunikasi Nasional	REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber daya air		menjadi tempat objek berada						
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Pola Ruang	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Alur Migrasi Biota Laut	REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada		Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan kawasan strategis Nasional yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penetapan Lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan kawasan strategis nasional yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penetapan Lokasi Kawasan Antar Wilayah	NAMOBJ	Menerangkan kawasan strategis nasional yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
A-2	Peta Rencana Tata Ruang Pulu/Kepulauan	Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rencana Struktur Ruang, Sistem Pusat Permukiman	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana Struktur Ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang, Sistem Jaringan Transportasi Nasional	SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Energi Nasional	WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Telekomunikasi Nasional	JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Sumber daya air	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Pola Ruang	SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi jenis rencana struktur ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana pola ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
A-3	Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	Perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Sistem Pusat Permukiman	NAMOBJ	Menerangkan kegiatan pusat kegiatan sebagai objek penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan dan jaringan sarana prasarana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber asal data dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Sistem Jaringan Transportasi	NAMOBJ	Menerangkan jaringan prasarana sebagai objek penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Sistem Jaringan Energi	JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan dan jaringan sarana prasarana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan jaringan prasarana sebagai objek penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan dan jaringan sarana prasarana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Sistem Jaringan Telekomunikasi	WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber asal data dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan jaringan prasarana sebagai objek penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang meliputi sistem perkotaan dan jaringan sarana prasarana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada (kabupaten/kota)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber asal data dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Sistem Jaringan Sumber Daya Air	NAMOBJ	Menerangkan jaringan prasarana sebagai objek penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang meliputi sistem perkolanan dan jaringan sarana prasarana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada (kabupaten/kota)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber asal data dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Sistem Jaringan Prasarana Permukiman	NAMOBJ	Menerangkan jaringan prasarana sebagai objek penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Menerangkan jenis rencana struktur ruang meliputi sistem perkolanan dan jaringan sarana prasarana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat				

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Pola Ruang	REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber asal data dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan zona sebagai objek penataan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				JSNRPR	Menerangkan jenis rencana pola ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				WADMKC	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ahir Migrasi Biota Laut	REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber asal data dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan orde terakhir pada rencana zonasi sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan orde 1 pada ahir migrasi biota laut	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan orde 2 pada ahir migrasi biota laut	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				SBDATA	Menerangkan sumber asal data dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
A-4	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian	Rencana Rencana Struktur Ruang, Pengembangan	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemanfaatan Ruang	Pusat Pelayanan	ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "ekisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sudirman, dan lain-lain.						
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisa RDTR, 2019".	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Struktur Ruang; Rencana Jaringan Transportasi	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "ekisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi	WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi	JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "eksisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "ekisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air	REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					jaringan prasarana di WP						
				STSJRN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "eksisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Struktur Ruang; Rencana	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaringan Air Minum		tata ruang sesuai skala rencana						
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "eksisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang Rencana jaringan prasarana di WP	STSRJN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "eksisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jaringan Persampahan		tata ruang sesuai skala rencana						
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRW	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "eksisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Struktur Ruang; Rencana Jaringan Drainase	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang, Rencana Jaringan Prasarana Lainnya		jaringan prasarana di WP							
				STSJRN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "eksisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang, Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "eksisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditilis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRN	Kondisi jaringan atau infrastruktur "rencana" atau "ekisting"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Pola Ruang	NAMOBJ	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMZON	Menerangkan klasifikasi zona pada rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KODZON	Menerangkan kode zona yang digunakan pada rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMSZN	Menerangkan klasifikasi turunan zona pada rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KODSZN	Menerangkan kode sub-zona yang digunakan pada rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				JNSRPR	Menerangkan kode sub-zona yang digunakan pada rencana pola ruang.	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KODEWP	Menerangkan satuan wilayah yang menjadi bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penulisan untuk nama WP menggunakan angka romawi, contoh penulisan: I, II, III, IV, V, dan seterusnya.	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KODSWP	Menerangkan bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. Penulisan untuk nama SWP menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KODEBLK	Menerangkan kode untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama blok menggunakan angka, contoh penulisan: 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KODSBL	Menerangkan turunan kode blok untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama sub-blok menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Provinsi yang menjadi tempat objek berada (kabupaten/kota)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMCK	Menerangkan satuan wilayah administrasi RDTR yang menjadi tempat objek berada (kecamatan)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				WADMKD	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada (keurahan/desa)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKOP_1	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsungkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan keselamatan operasi perhubungan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LP2B_2	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsungkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks lahan pertanian pangan berkelanjutan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KRB_03	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsungkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					konteks kawasan rawan bencana							
				TOD_04	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsungkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan berorientasi transit	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				TER_05	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsungkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks tempat evakuasi bencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PUSLIT	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks pusat penelitian	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				CAGBUD	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan cagar budaya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RESAIR	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan resapan air	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KSMPOD	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan sempadan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				HANKAM	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan pertahanan dan keamanan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKARST	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan karst	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PTBGM	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang-susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan pertambangan mineral dan batubara	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MGRSAT	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang-susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks kawasan migrasi satwa	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RDBUMI	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang-susunkan (overlay) di atas suatu zona/sub-zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri dalam konteks ruang dalam bumi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				TPZ_00	Menerangkan ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LUASHA	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektare (ha) dengan menggunakan proyeksi cylindrical equal area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDTPTG	Menerangkan informasi jenis sudut kepentingan dalam suatu penetapan kawasan strategis provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SBDATA	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
A-5	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Perencanaan Tata Ruang: Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rencana Struktur Ruang: Sistem Perumahan	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Transportasi	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Energi	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Telekomunikasi	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMFR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			Rencana Pola Ruang	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KODKWS	Kode kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRPR	Jenis rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKOP_1	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KP2B_2	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KRB_03	Kawasan rawan bencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				CAGBUD	Kawasan cagar budaya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RESAIR	Kawasan resapan air	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KSMFDN	Kawasan sempadan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				HANKAM	Kawasan pertahanan dan keamanan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKARST	Kawasan karst	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				FTBGMB	Kawasan pertambangan mineral dan batubara	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MGRSAT	Kawasan migrasi satwa	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RDHUMI	Ruang dalam bumi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DLKPEL	Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				BPALUR	Bagan pemisah alur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KPEKLT	Kawasan perlindungan ekosistem laut	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				APKINT	Area perjanjian kerja sama internasional	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LUASHA	Luas area dalam sektore	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Kawasan Strategis	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDTPFG	Sudut kepentingan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas
A-6	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rencana Struktur Ruang, Sistem Pusat Permukiman	ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Sumber Daya Air	ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KODKWS	Kode kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRPR	Jenis rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKC	Wilayah administrasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKOP_1	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KP2B_2	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KRB_3	Kawasan rawan bencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				CAGBUD	Kawasan cagar budaya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RESAIR	Kawasan resapan air	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KSMPPN	Kawasan sempadan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				HANKAM	Kawasan pertahanan dan keamanan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KKARST	Kawasan karst	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				FTBGMB	Kawasan pertambangan mineral dan batubara	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MGRSAT	Kawasan migrasi satwa	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RDHUMI	Ruang dalam bumi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LUASHA	Luas area dalam hektare	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Kawasan Strategis	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDTPG	Sudut kepentingan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
A-7	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	Perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rencana Struktur Ruang; Sistem Pusat Pelayanan	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Transportasi	ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Energi	SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Sumber Daya Air	ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang: Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan	REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			SDDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ORDE03	Orde 3	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE04	Orde 4	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KODKWS	Kode kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRPR	Jenis rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMFR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKC	Wilayah administrasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKOP_1	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KP2B_2	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KRB_03	Kawasan rawan bencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				CAGBUD	Kawasan cagar budaya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RESAIR	Kawasan resapan air	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KSMFND	Kawasan sempadan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				HANKAM	Kawasan pertahanan dan keamanan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKARST	Kawasan karst	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PTBGM	Kawasan pertambangan mineral dan batubara	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MGRSAT	Kawasan migrasi satwa	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RDBUMI	Ruang dalam bumi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LUASHA	Luas area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			Kawasan Strategis	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SDTPG	Sudut kepentingan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas
A-8	Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	Perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rencana Struktur Ruang; Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang; Rencana Jaringan Transportasi	WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			Rencana Struktur Ruang; Rencana Jaringan Energi	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang; Rencana Jaringan Telekomunikasi	JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			Rencana Struktur	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ruang: Rencana Jaringan Sumber Daya Air	ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			Rencana Struktur Ruang: Rencana Jaringan Air Mimim	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan							
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Rencana Struktur Ruang: Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				Rencana Struktur Ruang: Rencana Jaringan Persampahan	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
					ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				Rencana Struktur Ruang: Rencana Jaringan Persampahan	ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					STSJRJN	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
					WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rencana Struktur Ruang; Rencana Jaringan Drainase	REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				STSJRJV	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				WADMFR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
			SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat			
			Rencana Struktur Ruang; Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				ORDE01	Orde 1	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				ORDE02	Orde 2	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				JNSRSR	Jenis rencana struktur ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				STSJRJV	Status jaringan infrastruktur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rencana Pola Ruang	WADMFR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				SBDATA	Sumber data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				NAMOBJ	Nama objek	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				NAMZON	Nama zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				KODZON	Kode zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				NAMSZN	Nama sub-zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				KODSZN	Kode sub-zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				JNSRPR	Jenis rencana pola ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				KODEWP	Kode WP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				KODSWP	Kode SWP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				KODBLK	Kode blok	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				KODSBL	Kode sub-blok	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMFR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				WADMKC	Wilayah administrasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				WADMKD	Wilayah administrasi kecamatan/desa	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKOP_1	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LP2B_2	Lahan pertanian pangan berkelanjutan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KRB_03	Kawasan rawan bencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				TOD_04	Kawasan berorientasi transit	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				TEB_05	Tempat evakuasi bencana	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				FUSLIT	Pusat penelitian	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				CAGBUD	Kawasan cagar budaya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RESAIR	Kawasan resapan air	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KSMPDN	Kawasan sempadan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				HANKAM	Kawasan pertahanan dan keamanan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				KKARST	Kawasan karst	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				PTBGM	Kawasan pertambangan mineral dan batubara	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MGRSAT	Kawasan migrasi satwa	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No.	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri/ Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian/Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RDHUMI	Ruang dalam bumi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				TPZ_00	Teknik pengaturan zonasi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				REMARK	Catatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LUASHA	Luas area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

B. Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
B-1	Peta Tematik Bidang	Penetapan Hak; Pendaftaran Hak; Redistribusi Tanah; Pemberdayaan Masyarakat; Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai Rencana Tata Ruang; Pengadaan Tanah; Pengembangan Tanah; Konsolidasi Tanah; Penilaian Tanah; Pengendalian dan Penertiban atas Penguasaan atau Pemilikan Tanah; Penanganan atau Pencegahan Sengketa serta Konflik Pertanahan; Tematik Pertanahan Lainnya	Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penggunaan	Jenis penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Pemanfaatan	Jenis pemanfaatan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Luas	Luas area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			Penggunaan Tanah	ptnID	Nomor jenis penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ptnObjName	Jenis penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				area	Luas area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ptnDate	Tanggal pengambilan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				ptnRemarks	Keterangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Pemanfaatan Tanah	pfmID	Nomor jenis pemanfaatan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas
			pfmObjName		Jenis pemanfaatan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			area		Luas area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
			pfmDate		Tanggal pengambilan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan							
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
B-2	Peta Dasar Pertanahan -	Perapatan Batas	Pemilikan Tanah	pfmRemarks	Keterangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				pfmID	Nomor jenis pemilikan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				pfmObjName	Jenis pemilikan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				pfmSbjName	-	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				area	Luas area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				pfmRemarks	Keterangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			Penguasaan Tanah	psnID	Nomor jenis penguasaan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				psnObjName	Jenis penguasaan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				area	Luas area	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				psnDate	Tanggal pengambilan data	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				psnRemarks	Keterangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				FUNGSI_KWS	Kode fungsi kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan								
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Batas Kawasan Hutan	Tematik Pertanahan Lainnya	Kawasan Hutan (Area dan Garis)	F_UPDT	Singkatan fungsi kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat		
				SK	Nomor SK Penetapan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
				DISCLAIMER	Pernyataan Disclaimer "Peta perapatan batas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain yang telah dilakukan penetapan batas dan disetujui para pihak"	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
				LUAS_KM2	-	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
				HTN	Nama hutan (sesuai SK Penetapan)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	
			Perapatan Batas Kawasan Hutan (Titik)	FID	Nomor urut otomatis	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				C	Nomor patok	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				HTN	Nama hutan (sesuai SK Penetapan)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Shape	Polygon	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				PROVINSI	Nama provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
B-3	Peta Dasar Pertanahan - Unsur Dasar Pertanahan	Tematik Pertanahan Lainnya	Cakupan Peta Dasar Pertanahan	LUAS_2021	Luas cakupan peta dasar pertanahan sampai dengan tahun 2021	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup			
			Fitur Survei Informasi	NAMA	Nama objek	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup			

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dasar (TPW_KA0010)	NLP	NLP TM3	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				DESA_KEL	Nama desa	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				KECAMATAN	Nama kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				KABUPATEN	Nama kabupaten	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			Unsur Dasar Geografis	KDUNSUR	Kode unsur	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				TEMA	Tema unsur	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				SUBTEMA	Sub tema unsur	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				UNSUR	Unsur	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				NAMAUNSUR	Nama unsur	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				LABEL	Label	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			Perairan yang Delineasi (PAR_DAO010)	AIRANO	ID unsur perairan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				KODE	Kode perairan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				IDENTIFIKASI	Nama toponim	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			Transportasi Darat Yang Delineasi (TRD_CA0010)	TRDANO	ID unsur transportasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				KODE	Kode transportasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				IDENTIFIKASI	Nama toponim	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			Fitur Polygon untuk bangunan, jalan, dan perairan Yang Delineasi (F500BIDAR)	BIDAR_FID	ID unsur poligon	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				KODE	Kode poligon	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				IDENTIFIKASI	Nama toponim	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Shape_Length	Double	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Data Geodatabase	TPN_KA0010	Fitur survei informasi dasar	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				PAR_DA0010	Perairan yang Didelineasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				TRD_CA0010	Transportasi darat yang didelineasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				F500BIDAR	Fitur Polygon untuk bangunan, jalan, dan perairan yang didelineasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			LAYER BATAS ADMINISTRASI (ADM), Kode: 010000	10100	Batas negara	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				10200	Batas provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				10300	Batas kabupaten/ kota	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				10400	Batas kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				10500	Batas keurahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				10600	Batas desa	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				10700	Batas RW	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			10800	Batas RT	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
			LAYER TITIK TINGGI DAN SPOT HEIGHT (TOP), Kode: 050000	50100	Titik tinggi geodesi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				50200	Titik tinggi dari instansi lain	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			LAYER TITIK DASAR TEKNIK (TDI), Kode: 060000	60100	Titik dasar teknik	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				60101	TDI orde 0	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				60101	TDI orde 1	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			LAYER TEKS (TEKS), Kode: 080000	60102	TDI orde 2	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				60103	TDI orde 3	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				60104	TDI orde 4	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				60105	Perapatan 0	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				60200	Titik kerangka pemetaan dari instansi lain	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80000	Nama negara	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80101	Nama provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80102	Nama kabupaten/ kota	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80103	Nama kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80104	Nama desa/ keurahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80105	Nama RW	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80106	Nama RT	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80107	NIB	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80201	Nomor SU	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80202	Nomor hak	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			80203	Kode sub persil	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
			80204	Nama sungai	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
			80301	Nama saluran atau selokan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
			80302	Nama danau	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	
			80303	Nama rawa	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup	

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				80304	Nama empang atau kolam	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80305	Nama batas pantai	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80306	Nama dam	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80307	Nama galian	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80308	Nama jalan diperkeras	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80401	Nama jalan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80402	Nama jalan setapak di pemukiman, gang/leorong	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80403	Nama jalan setapak di sawah, ladang, perkebunan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80404	Nama jalan kereta api	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80405	Nama jalan lori	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80406	Nama jembatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80407	Identitas titik tinggi geodesi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80501	Identitas titik tinggi dari instansi lain	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80502	Identitas TDT orde 2	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80601	Identitas TDT orde 1	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80602	Identitas TDT orde 2	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80603	Identitas TDT orde 3	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80604	Identitas TDT orde 4	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80605	Identitas titik perapatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				80606	Identitas titik kerangka pemetaan dari instansi lain	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80607	Nama bangunan	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80701	Nama bangunan bertingkat	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80702	Nama menara transmisi	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80703	Identitas tiang listrik	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80704	Identitas tiang telepon	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80705	Identitas pipa	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80706	Identitas bangunan permanen	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				80707	Identitas bangunan tidak permanen	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			LAYER FRAME (FRAME), Kode: 110000	110100	Frame	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
			LAYER CITRA (CITRA), Kode: 120000	120100	Citra/foto udara .tiff	Mengunduh Penuh	Melihat	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-4	Peta Tematik Bidang - Bidang Tanah	Pendaftaran Tanah	Batas Bidang Tanah	PERSILID	Kode acak unik dari Aplikasi KKP	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				KANWIL	Identitas Kantor Wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KANTAH	Identitas Kantor Pertanahan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KODEWILAYAH	Kode wilayah provinsi-kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				NIB	Nomor identifikasi bidang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				SU	Nomor surat ukur	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				HAK	Nomor hak	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				TIPEHAK	Tipe hak (guna usaha, milik, guna bangunan, pakai, dan sebagainya)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				LUASTERTUL	Luas yang dicantumkan pada sertifikat	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				LUASPETA	Luas planimetris spasial bidang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				PRODUK	Produk dari suatu kegiatan (PTSL, Prona, dan sebagainya)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				TAHUN	Tahun terbit	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				SK	Nomor surat keterangan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				TANGGALSK	Tanggal diterbitkannya SK	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				TGLTERBITH	Tanggal diterbitkannya hak	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				BERAKHIRHA	Tanggal berakhirnya hak	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
				PEMILIK	Pemilik bidang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				TIPEPEMILI	Tipe pemilik (badan hukum, perseorangan, dan sebagainya)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Terutup
B-5	Peta Tematik Kawasan - Analisa Tanah Objek Reforma Agraria	Redistribusi tanah; Pemberdayaan tanah masyarakat; Pengadaan tanah	Analisa TORA	SK	Nomor SK atau Dokumen TORA, khususnya dari pelepasan kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Tanggal_SK	Tanggal SK atau Dokumen TORA, khususnya dari pelepasan kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Kriteria	Kriteria TORA, khususnya dari pelepasan kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Ket	Keterangan Kategori TORA, khususnya dari pelepasan kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Luas	Luasan (satuan hektare)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Kelayakan	Hasil Analisis Kelayakan TORA dengan parameter fisik (kelelerangan/gambut), kemampuan tanah dan peruntukan pada pola ruang daerah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Arahan Program	Hasil Analisis Lokasi TORA berupa arahan rekomendasi untuk Program Pertanahan Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah dan Legalisasi Aset	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Komoditas	Hasil analisis kemampuan tanah dan kesesuaian untuk komoditas pertanian untuk potensi akses reform	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Kluster	Kelompok objek yang bersumber dari kluster utama pelepasan kawasan hutan, tanah negara eks HGU dan lainnya, transmigrasi atau usulan masyarakat	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-6	Peta Tematik Kawasan - Potensi Objek Redistribusi Tanah	Redistribusi tanah; Pemberdayaan tanah masyarakat; Pengadaan tanah	Analisis Potensi Objek Redistribusi Tanah	SK	Nomor SK atau Dokumen TORA, khususnya dari pelepasan kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Tanggal_SK	Tanggal atau Dokumen TORA, khususnya	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dari pelepasan kawasan hutan						
				Kriteria	Kriteria TORA, khususnya dari pelepasan kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Ket	Keterangan Kategori TORA, khususnya dari pelepasan kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Luas	Luasan (satuan hektare)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Kelayakan	Hasil Analisis Kelayakan TORA dengan parameter fisik (lelecegan/gambut), kemampuan tanah dan peruntukan pada pola ruang daerah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Penggunaan Tanah	Jenis penggunaan tanah eksisting	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Pola Ruang	Peruntukan tanah berdasarkan RTRW/RDTR yang digunakan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Prioritas	Keterangan prioritas untuk ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Masalah	Klasifikasi hambatan, kendala atau masalah yang telah diidentifikasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Keterangan	Keterangan kondisi Penguasaan dan informasi penting lainnya	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-7	Peta Tematik Kawasan Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria	Redistribusi tanah; Pemberdayaan tanah masyarakat; Pengadaan tanah	Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria	SK	Nomor SK atau Dokumen TORA	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Tanggal_SK	Tanggal SK atau Dokumen TORA	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Kriteria	Kriteria TORA	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Keterangan	Keterangan kondisi dan informasi penting lainnya	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Luas	Luasan (satuan hektare)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Sumber	Keterangan Sumber TORA	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-8	Peta Tematik Bidang Sebaran Lokasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Data Subjek Penanganan Akses Reforma Agraria berdasarkan lokasi kepemilikan lahan	nik	Keterangan nomor induk kependudukan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				nama	Keterangan nama subjek penanganan akses reforma agraria	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				alamat	Keterangan alamat subjek penanganan akses reforma agraria	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				nama_provinsi	Provinsi lokasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				nama_kab_kota	Kabupaten/kota lokasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				nama_kecamatan	Kecamatan lokasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				nama_desa_kelurahan	Desa/keurahan lokasi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				status_shat	Keterangan kepemilikan lahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				luas_shat	Keterangan luas lahan (satuan m ²)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				titik_koordinat_lintang	Keterangan titik lintang	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				titik_koordinat_bujur	Keterangan titik bujur	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				penggunaan_tanah	Keterangan penggunaan tanahnya	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				nama_sektor_usaha	Keterangan sektor usahanya	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				nama_jenis_sektor_usaha	Keterangan jenis sektor usahanya	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				nama_jenis_sub_sektor_usaha	Keterangan jenis sub sektor usahanya	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				jenis_pemberdayaan	Keterangan model pemberdayaan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				jenis_pendampingan	Keterangan jenis pendampingan yang diberikan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
nama_ip	Keterangan instansi yang	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup				

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					memberikan pendampingan						
				tanggal_monitor	Keterangan tanggal monitor penghasilan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				penghasilan_total	Keterangan hasil survei penghasilan total	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-9	Infografis Pulau-Pulau Kecil Terluar	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Persebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia	FID	Nomer identifikasi polygon	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Shape	Bentuk objek	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				OBJECTID_1	Nomor ID objek	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				wadName	Lokasi desa	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				KECAMATAN	Lokasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				KABUPATEN	Lokasi kabupaten	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				PROVINSI	Lokasi provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				LUAS_PULAU	Luas pulau	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				TUTUPAN_LH	Tutupan lahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
PT	Penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup				
B-10	Peta Tematik Kawasan - Data Potensi WP3WT	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Data Wilayah Pesisir, Data Pulau-Pulau Kecil, Data Perbatasan, dan data Wilayah Tertentu	FID	Nomer identifikasi polygon	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Shape	Bentuk objek	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				objType	Tipe objek	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				objYear	Tahun objek	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				wadName	Lokasi desa	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				wacName	Lokasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				wakName	Lokasi kabupaten	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				wapName	Lokasi provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				psnID	ID penguasaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				psnObjName	Jenis penguasaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				pmsID	ID pemilikan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				pmsObjName	Jenis pemilikan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				ptnID	ID penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				ptnObjName	Jenis penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				pfnID	ID pemanfaatan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				pfnObjName	Jenis pemanfaatan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Luas_Ha	Luas polygon	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
B-11	Peta Tematik Kawasan - Lahan Baku Sawah Nasional	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang; Pengendalian dan penerbitan atas penguasaan atau pemilikan tanah	Lahan Baku Sawah	WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Q_NAME19	Penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Luas Polygon	Mengunduh penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
				5	6	7	8	9	10	11	12
B-12	Peta Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kota	Gname25	Nama penggunaan tanah lama	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Gcode25	Kode penomoran penggunaan tanah lama	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Qname25	Nama penggunaan tanah baru	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Qcode25	Kode penomoran penggunaan tanah baru	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Greklas	Pengreklasan penggunaan tanah lama	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Qreklas	Pengreklasan penggunaan tanah baru	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Oname	Nama penguasaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Ocode	Kode penomoran penguasaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Wname	Nama peruntukan RTRW kabupaten/ kota	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Kws_Hutan	Penamaan nomenklatur kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				GQreklas	Perubahan penggunaan tanah lama ke baru	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Nname	Kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan									
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				VnameW	Ketersediaan tanah terhadap RTRW	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				VnameO	Ketersediaan tanah terhadap GUPT	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				Vname	Ketersediaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				V_arahan	Ketersediaan tanah terhadap arahan RTRW	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				Potensi_RA	Potensi reforma agraria	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup				
				Kecaname	Lokasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				Kecacode	Kode lokasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				Kabuname	Lokasi kabupaten	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				Kabrcode	Kode lokasi kabupaten	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				Provname	Lokasi provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				Provcode	Kode lokasi provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
				B-13	Peta Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan	Qname10	Nama penggunaan tanah baru	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
								Qcode10	Kode penomoran penggunaan tanah baru	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
Wname	Nama peruntukan RTRW kabupaten/ kota	Mengunduh Penuh	Melihat					Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
Kws_Hutan	Penamaan nomenklatur kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Melihat					Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				
Nname	Kesesuaian penggunaan	Mengunduh Penuh	Melihat					Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan							
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					tanah terhadap RTRW								
				VnameW	Ketersediaan tanah terhadap RTRW	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				VnameO	Ketersediaan tanah terhadap GUP	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				Vname	Ketersediaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				V_arahan	Ketersediaan tanah terhadap arahan RTRW	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				Potensi_RA	Potensi reforma agraria	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup		
				Kecaname	Lokasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				Kecacode	Kode lokasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				Kabuname	Lokasi kabupaten	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				Kabucode	Kode lokasi kabupaten	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				Provname	Lokasi provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
				Provcode	Kode lokasi provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat		
B-14	Peta Tematik Bidang - Pertimbangan Teknis Pertanahan	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan	WADMKD	Wilayah administrasi keurahan/ desa	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup	
				WADMKC	Wilayah administrasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/ kota	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				Penohon	Nama pemohon PTP	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Perusahaan	Bergerak atas nama	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
				Alamat Prs	Alamat perusahaan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
				NIB	NIB (untuk permohonan yang sudah memiliki NIB)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	
				Peruntukan	Rencana peruntukan kegiatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
				No Berkas	Nomor berkas PTP	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
				Tgl Risalah	Tanggal risalah dibuat	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
				No PTP	Nomor PTP	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
				Luas PTP	Luas permohonan PTP	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
				Ket	Keterangan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup	
B-15	Peta Tematik Bidang - Inventarisasi Tanah Kritis	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Inventarisasi Tanah Kritis	WADMKD	Wilayah administrasi keurahan/ desa	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				WADMKC	Wilayah administrasi kecamatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				WADMKK	Wilayah administrasi kabupaten/ kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				WADMPR	Wilayah administrasi provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				Riwayat	Keterangan riwayat jenis pemanfaatan dari daerah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				Kegiatan	Nama/jenis kegiatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian /Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program	Arahan program berdasarkan TCK	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Pengelola	Arahan Pengelolaan berdasarkan TCK	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Oname	Informasi jenis penguasaan tanah dan pihak yang menguasai	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Oname_Rek	Reklasifikasi Oname21, informasi tipe penguasaan tanah berdasarkan standarisasi basis data PGT	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Ocode	Kode jenis penguasaan tanah berdasarkan standarisasi basisdata PGT tahun 2019	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Qname	Penggunaan tanah di tahun kegiatan inventarisasi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Qname50	Penggunaan tanah skala 1:50.000	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Qcode50	Kode jenis penggunaan tanah skala 1:50.000 berdasarkan standarisasi basisdata PGT tahun 2019	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian /Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Qname100	Penggunaan tanah skala 1:100.000	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Qcode100	Kode jenis penggunaan tanah skala 1:100.000 berdasarkan standarisasi basisdata PGT tahun 2019	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Pmanfaatan	Pemanfaatan tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Wname	Nama peruntukan RTRW kabupaten/ kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Wname_Rek	Reklasifikasi rencana tata ruang	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Luas_Ha	Luas polygon	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				Tahun_Data	Menunjukkan tahun kegiatan/pendataan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
B-16	Peta Tematik Bidang Tanah Terindikasi Telantar	Pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah	Pemanfaatan Tanah	Penggunaan	Jenis penggunaan lahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Pemanfaatan	Jenis pemanfaatan lahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Luas	Luas bidang tanah dalam hektare	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Kesesuaian dengan RTRW	Kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesesuaian dengan Peruntukan	Kesesuaian lahan dengan peruntukan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-17	Peta Tematik Kawasan - Kawasan Terindikasi Telantar	Pengendalian dan penerbitan atas penguasaan atau pemilikan tanah	Penggunaan dan Pemanfaatan	Penggunaan	Jenis penggunaan lahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Pemanfaatan	Jenis pemanfaatan lahan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Luas	Luas Bidang tanah dalam hektare	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Kesesuaian dengan RTRW	Kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-18	Peta Zona Nilai Tanah	Penilaian Tanah	Zona Nilai Tanah	JENIA_ZONA	Informasi penggunaan tanah (menunjuk pertanian dan nonpertanian)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				COUNT_	Jumlah sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				SUM_	Jumlah nilai seluruh sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MEAN_	Rata-rata nilai sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MAX_	Nilai maksimal sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MIN_	Nilai minimal sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RANGE	Jangkauan nilai sampel dalam satu zona (nilai maksimal)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dikurang nilai minimal)						
				VARIANCE	Variansi nilai sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				STDDEV	Simpangan baku nilai sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				PSTDDEV	Koefisien variasi sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				RPBULAT	Hasil pembulatan nilai dari rata-rata nilai sampel dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				MEAN_LAMA	Rata-rata nilai ZNT tahun sebelumnya	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NILAI_BARU	Nilai ZNT hasil pembaruan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
B-19	Peta Tematik Kawasan - Sebaran Potensi Pengembangan Pertanahan	Pengembangan Pertanahan	Potensi Pengembangan	Provinsi	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Kabupaten/Kota	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Kecamatan	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Kelurahan/Desa	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Penguasaan	Kondisi penguasaan tanah pada kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Pemilikan	Status kepemilikan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					tanah pada kawasan						
				Penggunaan	Distribusi guna lahan eksisting pada kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Peruntukan	Distribusi peruntukan fungsi ruang dan tanah pada kawasan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Potensi	Potensi pengembangan kawasan berdasarkan hasil analisis lokasi dari aspek tata ruang dan pertanahan dengan klasifikasi potensi perkotaan, potensi nonperkotaan, dan tidak berpotensi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				Luas	Luas delineasi kawasan yang berpotensi dalam satuan hektare	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
B-20	Peta Tematik Bidang - Potensi Subjek Konsolidasi Tanah	Konsolidasi tanah; Pengadaan tanah; Pengembangan tanah	Peta Potensi Subjek KT	DESA_KEL	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KECAMATAN	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KAB_KOTA	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				POLA_RUANG	Peruntukan tanah berdasarkan RTRW/RDTR yang digunakan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				PGN	Jenis Penggunaan tanah eksisting	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				PMN	Pemilikan tanah (SHM, SHGU, SHGB, Girik, Petak, dan lain-lain)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				LUAS_TANAH	Luas bidang tanah m ²	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				NAMA	Nama pemilik	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				KESEPAKATAN	Setuju/tidak mengikuti Program Konsolidasi Tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				SK_PENLOK_KT	Nomor SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				TGL_PENLOK_KT	Tanggal SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				SHAPE_Leng	Panjang shp	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				SHAPE_Area	Luas shp	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
B-21	Peta Desain Konsolidasi Tanah	Konsolidasi tanah; Pengadaan tanah; Pengembangan tanah	Peta Desain Konsolidasi Tanah	PROVINSI	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KAB_KOTA	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KECAMATAN	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				DESA_KEL	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				TAHUN	Informasi tahun kegiatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				NAMA	Nama pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				NIK	Identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				TTL	Identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				ALAMAT	Identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				RENC_PGN	Rencana penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				LUAS_TANAH	Luas tanah hasil desain m ²	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				LUAS_TP	Luas tanah untuk pembangunan m ²	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				UTARA	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah utara	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				TIMUR	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah timur	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				SELATAN	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah selatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				BARAT	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah barat	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B-22	Peta Hasil Penerapan Desain Konsolidasi Tanah	Konsolidasi tanah; Pengadaan tanah; Pengembangan tanah	Peta Hasil Penerapan Desain Konsolidasi Tanah	PROVINSI	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KAB_KOTA	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KECAMATAN	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				DESA_KEL	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				TAHUN	Informasi tahun kegiatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				SK_PENEGASAN	Nomor SK Penegasan KT	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				TGL_SK_PENEGASAN	Tanggal SK Penegasan KT	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				NAMA	Nama pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				NIK	Identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				TTL	Identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				ALAMAT	Identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				NIB	Nomor identifikasi bidang	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				NO_SU	Nomor surat ukur	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				TGL_SU	Tanggal surat ukur	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				NO_HAK	Nomor hak atas tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				LUAS_BID	Luas bidang tanah m ² (hasil pengukuran kadasteral)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
PGN	Jenis penggunaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat				

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				LUAS_TP	Luas tanah untuk pembangunan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				UTARA	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah utara	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				TIMUR	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah timur	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				SELATAN	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah selatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
				BARAT	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah barat	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Tertutup
B-23	Peta Tematik Kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi 8 Provinsi	Penatagunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang; Pengendalian dan penertiban atas penguasaan atau pemilikan tanah	Peta Tematik Kawasan: Penggunaan dan Pemanfaatan	Hutan	Kawasan hutan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				LSD	Lahan sawah dilindungi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Luas	Luas sawah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Provinsi	Provinsi	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Cetak_Swh	Cetak sawah	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				Metadata	Metadata	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-24	Peta Tematik Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Penanganan atau pencegahan sengketa serta konflik pertanahan	Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penggunaan	Jenis penggunaan tanah eksisting	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
				Pemanfaatan	Jenis pemanfaatan tanah eksisting	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan					
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemilik	Perbedaan antara pemilik dan penguasaan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Tertutup
B-25	Peta Tematik Bidang Konsolidasi Tanah	Konsolidasi tanah; Pengadaan tanah; Pengembangan tanah	Konsolidasi Tanah	PROVINSI	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KAB_KOTA	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				KECAMATAN	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				DESA_KEL	Informasi administrasi wilayah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				SK_PENLOK_KT	Nomor SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				TGL_PENLOK_KT	Tanggal SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				TAHUN	Informasi tahun kegiatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				NAMA	Nama pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				NIK	NIK identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				TTL	Tempat tanggal lahir identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				ALAMAT	Identitas pemilik	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat
				PMN	Pemilikan tanah (SHM, SHGU, SHGH, Girik, Petuk, Ketitir)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				NIB	Nomor identifikasi bidang	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	
				NO_SU	Nomor surat ukur semua bidang tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				TGL_SU	Tanggal surat ukur semua bidang tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				NO_HAK	Nomor hak atas tanah (tanah bersertipikat)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				LUAS_BID	Luas bidang tanah m ² (hasil pengukuran kadastral)	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				UTARA	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah utara	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				TIMUR	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah timur	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				SELATAN	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah selatan	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				BARAT	Nama pemilik/ penggunaan di batas sebelah barat	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
B-26	Peta Tematik Bidang - Hak Atas Tanah	Penetapan hak; Pendaftaran tanah	Hak Atas Tanah (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan)	NIB	Nomor identifikasi bidang	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				NOMORHAK	Nomor registrasi hak atas tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				PEMEGANGHAK	Nama pihak pemegang hak	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				NOMORSK	Nomor SK Penetapan Hak	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				TANGGAL	Tanggal penerbitan SK Penetapan Hak	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
				BERAKHIR	Tanggal berakhirnya SK Penetapan Hak	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Tertutup
B-27	Peta Tematik Kawasan - Kemampuan Tanah	Penetapan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang	Kemampuan Tanah	Lname	Kode kesimpulan kemampuan tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Ucode	Kode kedalaman efektif tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Uname	Keterangan kedalaman efektif tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Ulabel	Label kedalaman efektif tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Xcode	Kode tekstur tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Xname	Keterangan tekstur tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Xlabel	Label tekstur tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Dcode	Kode drainase tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Dname	Keterangan drainase tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
				Ecode	Kode erosi tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat
Ename	Keterangan erosi tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat				
Elabel	Label erosi tanah	Mengunduh Penuh	Melihat	Mengunduh Terbatas	Melihat	Melihat	Melihat	Melihat				
B-28	Peta Tematik Bidang - Nilai Bidang Tanah	Penilaian tanah; Pengadaan tanah; Pengembangan tanah	Nilai Bidang Tanah	RANGE	Jangkauan nilai sampel dalam satu zona (nilai maksimal)	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat	

No	Jenis IGT	Kegiatan	Data	Entitas		Pemangku Kepentingan						
				Kolom	Keterangan Kolom	Menteri / Wakil Menteri	Pimpinan Kementerian / Lembaga Lainnya	Eselon I Kementerian (selain Unit Produksi)	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Nonpemerintah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					dikurang nilai minimal)							
				RPBULAT	Hasil pembulatan nilai dalam satu zona	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat
				NILAI BARU	nilai ZNT hasil pembulatan	Mengunduh Penuh	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Mengunduh Terbatas	Melihat

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
 GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN IGT PERTANAHAN DAN RUANG
 TANPA MELALUI JIG

KOP LEMBAGA TERKAIT

Nomor :
 Hal :
 Lampiran: Daftar Permohonan Data dan Informasi IGT Pertanahan dan Ruang

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal ... dan/atau Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan,
 Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dengan Hormat,
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama/NIP :
 Instansi :
 Jabatan :
 Email :
 Telp :
 :

Dengan ini mengajukan permohonan data informasi IGT Pertanahan dan Ruang
 sebagaimana terlampir dalam lampiran daftar permohonan data untuk:

Kegiatan :
 Deskripsi Kegiatan :
 Lokasi :
 :

Adapun data tersebut dipahami bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk
 kepentingan kegiatan tersebut di atas dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin
 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 Demikian permohonan kami, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Yang bertanda tangan,

(Nama)
 NIP

Tembusan:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor:

Lampiran Daftar Permohonan IGT Pertanahan dan Ruang

Data dan Informasi IGT Pertanahan dan Ruang yang dimohon terdiri atas:

No	Jenis Data	Kriteria IGT Pertanahan dan Ruang yang Dibutuhkan	Tujuan Penggunaan IGT Pertanahan dan Ruang

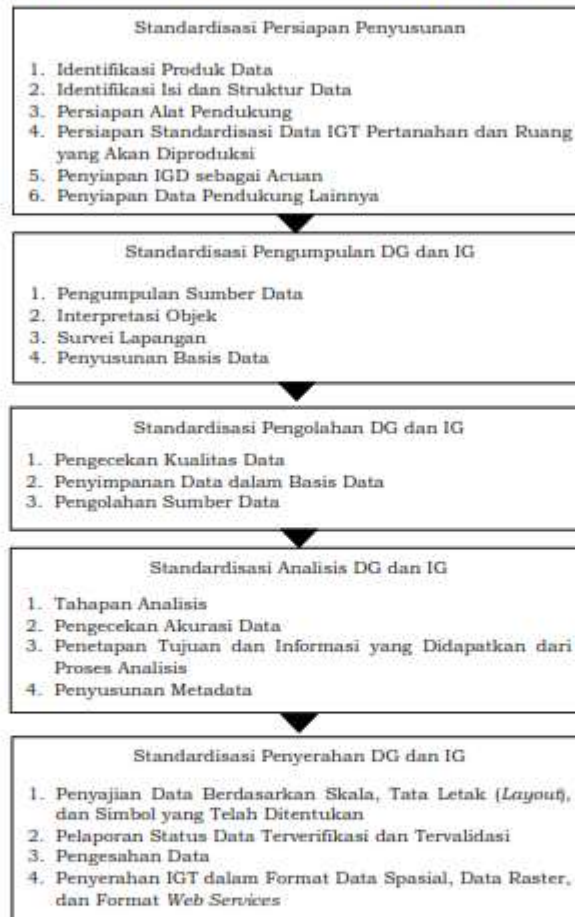
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
 TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN STANDARDISASI
 IGT PERTANAHAN DAN RUANG OLEH UNIT PRODUKSI



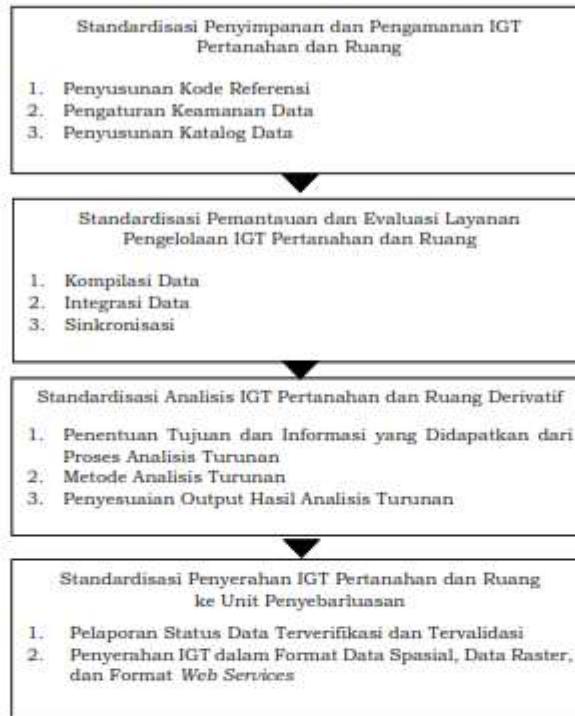
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN STANDARDISASI
IGT PERTANAHAN DAN RUANG OLEH UNIT PENGELOLA



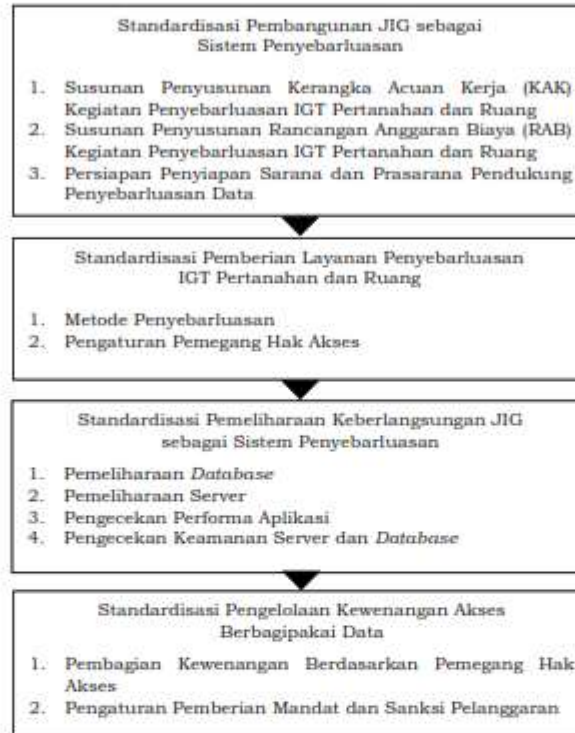
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
 TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN STANDARDISASI
 IGT PERTANAHAN DAN RUANG OLEH UNIT PENYEBARLUASAN



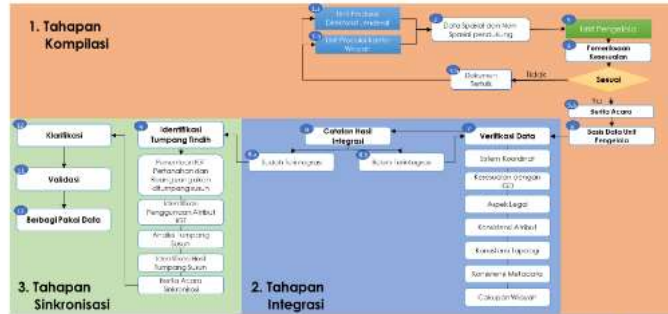
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
 GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

MEKANISME KEGIATAN KOMPLIASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
 TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

FORMAT BERITA ACARA DAN DOKUMEN TERTULIS HASIL KOMPILASI IGT
 PERTANAHAN DAN RUANG

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL KOMPILASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG

<p>KOP KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p> <p>BERITA ACARA KOMPILASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG Nomor: Identitas Unit Produksi:</p> <p>Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah melakukan kompilasi IGT Pertanahan dan Ruang dengan resume sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Produksi telah menyampaikan IGT Pertanahan dan Ruang dan dokumen pendukung kepada Tim Pemeriksa berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Data digital format shapefile/CAD/jpeg/lainnya dengan cakupan b. Peta cetak (judul peta) dengan skala c. Dokumen Perda/Pergub/Perbup/SK/lainnya Nomor tentang 2. Tim Pemeriksa telah menerima dan melaksanakan kompilasi dan pengecekan IGT serta dokumen pendukung; 3. Tim Pemeriksa telah menyerahkan hasil kompilasi dan pengecekan IGT Pertanahan dan Ruang kepada Unit Produksi dalam bentuk catatan dan rekomendasi (terlampir) 4. Tim Pemeriksa menyatakan bahwa IGT Pertanahan dan Ruang yang telah disampaikan oleh Unit Produksi dapat dipergunakan sesuai dengan kewenangannya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 5. Unit Produksi bersedia melengkapi/menindaklanjuti catatan dan rekomendasi tersebut dengan berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa dan unit penyebarluasan 6. Tim Pemeriksa bersedia membantu melakukan revisi/perubahan yang diperlukan atas IGT Pertanahan dan Ruang yang telah diserahkan tersebut untuk proses integrasi IGT Pertanahan dan Ruang dan IGD. <p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Produksi</p> <p>(Nama) NIP</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Ketua Tim Pemeriksa</p> <p>(Nama) NIP</p> </td> </tr> </table>		<p>Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Produksi</p> <p>(Nama) NIP</p>	<p>Ketua Tim Pemeriksa</p> <p>(Nama) NIP</p>
<p>Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Produksi</p> <p>(Nama) NIP</p>	<p>Ketua Tim Pemeriksa</p> <p>(Nama) NIP</p>		

B. FORMAT DOKUMEN TERTULIS HASIL KOMPILASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG

<p style="text-align: center;">KOP KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p> <p style="text-align: center;">DOKUMEN TERTULIS HASIL KOMPILASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG Nomor: Identitas Unit Produksi:</p> <p>Telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data atas IGT Pertanahan dan Ruang tersebut di atas oleh Tim Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut:</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>Berdasarkan keterangan tersebut, IGT Pertanahan dan Ruang dinyatakan belum lengkap maka Unit Produksi yang bersangkutan harus memperbaiki dan melengkapi data IGT Pertanahan dan Ruang.</p> <p style="text-align: center;">Ketua Tim Pemeriksa</p> <p style="text-align: center;">(Nama) NIP.</p>

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

FORMAT DOKUMEN TERTULIS DAN BERITA ACARA HASIL INTEGRASI IGT
PERTANAHAN DAN RUANG

A. FORMAT DOKUMEN TERTULIS HASIL INTEGRASI IGT PERTANAHAN DAN
RUANG

<p>FORMAT DOKUMEN TERTULIS HASIL INTEGRASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG</p> <p>KOP KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p> <p>DOKUMEN TERTULIS HASIL INTEGRASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG</p> <p>Nomor:</p> <p>Identitas Unit Produksi:</p> <p>Telah dilakukan verifikasi dan pengecekan atas IGT Pertanahan dan Ruang tersebut di atas oleh Tim Pemeriksa, dengan keterangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3. <p>Berdasarkan keterangan tersebut, IGT Pertanahan dan Ruang yang diajukan belum terintegrasi. Berdasarkan catatan yang disampaikan, Unit Produksi yang bersangkutan harus memperbaiki data IGT Pertanahan dan Ruang dimaksud.</p> <p>Ketua Tim Pemeriksa</p> <p>(Nama) NIP</p>

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL INTEGRASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG

<p>KOP KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL</p> <p>BERITA ACARA HASIL INTEGRASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG</p> <p>Nomor:</p> <p>Identitas Unit Produksi:</p> <p>Nama IGT Pertanahan dan Ruang:</p> <p>Telah dilakukan integrasi dan pengecekan atas IGT Pertanahan dan Ruang tersebut di atas oleh Tim Integrasi, dengan keterangan sebagai berikut:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>Berdasarkan keterangan tersebut, maka IGT Pertanahan dan Ruang yang diajukan sudah terintegrasi.</p> <table><tr><td style="text-align: center;">Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Produksi</td><td style="text-align: center;">Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Pengelola</td></tr><tr><td style="text-align: center;">(Nama)</td><td style="text-align: center;">(Nama)</td></tr><tr><td style="text-align: center;">NIP</td><td style="text-align: center;">NIP</td></tr></table>		Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Produksi	Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Pengelola	(Nama)	(Nama)	NIP	NIP
Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Produksi	Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Pengelola						
(Nama)	(Nama)						
NIP	NIP						

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
 GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG

FORMAT BERITA ACARA HASIL SINKRONISASI
 IGT PERTANAHAN DAN RUANG

BERITA ACARA HASIL SINKRONISASI IGT PERTANAHAN DAN RUANG	
Nomor:	
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang menyatakan:	
1. Tim Sinkronisasi bersama unit produksi telah menerima dan melaksanakan sinkronisasi IGT Pertanahan dan Ruang sebagai berikut:	
a. Contoh: Hak Guna Bangunan;	
b. Hak milik;	
c. dst	
2. Berdasarkan hasil sinkronisasi terdapat catatan sebagai berikut:	
a.	
b.	
c.; dst	
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.	
Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Produksi	Jabatan Pejabat yang mewakili Unit Pengelola
(Nama) NIP	(Nama) NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO